



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS JEMBER

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **FENDI SETYAWAN**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI**
3. NHK : **807133**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.745.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 198 m2/105 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 710.000.000
2. Tanah Seluas 1.473 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 455.000.000
3. Tanah Seluas 1.420 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 455.000.000
4. Tanah Seluas 2.305 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 655.000.000
5. Tanah Seluas 1.938 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 470.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 585.500.000**

1. MOTOR, HONDA E1F02N11M2 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
2. MOTOR, HONDA D1B02N12L2 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, HONDA JEEP Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
4. MOBIL, HONDA DG48 1.5 RS GVT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 3.750.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	57.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.391.250.000
III. HUTANG	Rp.	546.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.845.250.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.